

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta : Pustaka Setia.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Ani Sri Rahayu, 2018, "*Pengantar Pemerintahan Desa*", Malang : Sinar Grafika

Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada.

Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

H.A.W. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yagn Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Hari Sabarno, 2007, "*Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*", Jakarta: Sinar Grafika

Jimly assiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Laica Marzuki M, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 1987, *Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Sumatera Barat: Tropic Offset Printing,

Rinto Adi, 2005, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, Jakarta

Saldi isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi “ Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia “* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah*. Bandung: Mandar Maju.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Taliziduhu Ndraha, 1982, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Perubahan)

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

C. Jurnal, Artikel, Makalah

Dodi Eko Wijayanto, *Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Vol.2 No.1, Jurnal Independent.

Surya Prahara, 2013, *Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam*, Vol. 6 No. 1, Stkip Pgri Sumatera Barat.

Indra yazir, 2018, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Bprn) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Tanjuangalamkecamatan Tanjuang Barukabupaten Tanah Datar*”, Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar

Yunani Hasjimzoem, 2014, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No.3

Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Depdagri, Jakarta, 2007

D. Website

Di akses dari

Pengertian pemerintahan menurut para ahli,

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/9-pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli-lengkap.html>.

Diakses dari

http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desajenisdesa/

Diakses dari

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/09/pengertian-desa.html>

